

KONSEP EKONOMI PANCASILA DAN RELEVANSINYA TERHADAP NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM

Studi Atas Pemikiran Prof. Dr. Mubyarto

Ahmad Fuad

Dosen Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Indragiri
fuadppp2018@gmail.com

Dima Hafizul Ilmi

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah
Universitas Islam Indragiri

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang ekonomi Pancasila dan untuk mengetahui dimana titik relevansinya terhadap ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yakni dengan mengacu pada sumber utama yang berjudul "Ekonomi Pancasila" karangan Prof. Dr. Mubyarto dan ditambah dengan buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode penulisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan jalan mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dan analisis secara langsung sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data content analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan Konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Prof. Dr.

Kata Kunci

Mabyarto,
Demokrasi
Ekonomi,
Ekonomi
Kerakyatan,
Ekonomi
Pancasila,
Ekonomi Islam

Mubyarto ini sejalan dan berkaitan dengan konsep ekonomi dalam Islam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesamaan tujuan, yakni sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan sosial, yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis.

Kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan tujuan utama dari umat manusia hidup di dunia ini. Setiap bangsa pasti ingin mencapai kemajuan, tidak saja kemajuan demi kemajuan itu sendiri, tetapi kemajuan yang berarti kemampuan yang semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang semakin beraneka warna, dan kemajuan yang berarti kehidupan yang baik, lebih sejahtera, lebih berbahagia.¹

Persoalan ekonomi menjadi kompleks ketika sudah dihadapkan dengan masalah-masalah kenyataan hidup, seperti kemiskinan, pengangguran, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa. Ekonomi akan menjadi rujukan utama dalam menjawab permasalahan tersebut. Oleh karenanya, ilmu ekonomi dan sistem ekonomi yang diterapkan disuatu negara merupakan sebuah kekuatan dan solusi yang sangat teramat penting bagi kehidupan bangsanya.²

Sistem ekonomi yang dianut suatu negara merupakan sub sistem dari sistem yang lain dan masing-masing saling terkait. Sub sistem ekonomi, terkait dengan agama, sub sistem politik, sub sistem sosial, sub sistem hukum, dan kemudian akan membentuk supra sistem kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Terdapat kecenderungan umum bahwa sistem ekonomi di suatu negara pada

¹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila (Lintasan Pemikiran Mubyarto)*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997) h. 149.

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h. 6.

umumnya bergandengan tangan secara erat dengan sistem politik, budaya dan agama yang dianut oleh negara tersebut.³

Indonesia merupakan negara yang tidak bisa terlepas dari tatanan kolonialisme dan imperialisme. Selama kurang lebih 350 tahun Belanda menguasai Nusantara kemudian digantikan oleh Jepang dalam jangka waktu kurang lebih 3,5 tahun. Tidak heran jika pertarungan antara dua kutub sistem politik ekonomi dunia yakni liberal kapitalis dan sosialis komunis terus membayangi perkembangan bangsa Indonesia sampai sekarang. Di sisi lain, saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan imperialisme ekonomi, hegemoni global, dan neo kolonialisme. Hal ini ditandai dengan derasnya arus globalisasi dan sistem pasar bebas, sehingga mampu menerobos kehidupan politik-ekonomi banyak negara di dunia yang berakibat pada proses perdagangan uang dan barang semakin luas, cepat, dan mampu menembus batas negara.⁴

Globalisasi dengan globalismenya terlanjur dikagumi oleh dunia termasuk kalangan elite Indonesia, hal ini diperkuat lagi ditandai dengan runtuhnya sosialis dan menguatnya kapitalis barat dengan sistem pasar bebasnya. Sikap kaum elite ini kemudian menjadi ambivalen terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kebangsaan dan kerakyatan yang melandasinya. Sistem ekonomi Indonesia semakin terdistorsi bahkan mengalami suatu pendangkalan. Pada akhirnya globalisme ini yang akan melahirkan imperialisme model baru yakni neo kolonialisme.⁵

Indonesia dimata dunia dipandang sebagai negara *emerging market* dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diperhitungkan dipentas global, namun setelah berjalannya reformasi 1998 sampai dengan beberapa tahun terakhir, semakin

³ Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) h. 3.

⁴ Muhammad Ali Akbar dan Moh. Idil Ghufroon, *Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam*, (Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah) Vol. 4, No.1, 2019. h. 35.

⁵ Sofyan Sulaiman, *Ekonomi Indonesia*, (Jurnal: Syariah UNISI) Vol. VII, No.2, Oktober 2019. h. 7.

terlihat jelas bahwa bangunan ekonomi Indonesia sangat rapuh. Hal ini ditandai dengan seringnya pemerintah melakukan revisi kebijakan yang sebelumnya sangat optimis menjadi pesimis. Akar dari permasalahan ini adalah paham ekonomi yang dianut selama era reformasi lebih condong kepada neo liberalisme pasar bebas, dimana pemerintah menyerahkan persoalan ekonomi kepada pasar. Hal ini yang menjadikan terlihat tidak adanya kedaulatan Indonesia dalam globalisasi akibat meratifikasi berbagai macam perjanjian internasional yang belum tentu dapat menyelesaikan persoalan dasar di Indonesia. Selain itu, sering kali kebijakan yang diambil oleh pemerintah justru memperburuk perekonomian akibat tidak berjalannya *good governance*.⁶

Ekonomi Indonesia sendiri pada awal mulanya disusun sejak awal kemerdekaan melalui “Perencanaan Pembangunan Ekonomi”. Pada tahun 1947 didirikan perencanaan dengan nama Panitia Pemikir Siasat Ekonomi sebagai cikal bakal badan perencanaan, yang kemudian namanya menjadi DEPERNAS dan kemudian secara permanen berubah menjadi BAPPENAS. Perencanaan pembangunan berisi cita-cita masa depan perekonomian nasional untuk memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, memperkuat kesatuan ekonomi nasional demi meningkatkan ketahanan nasional Indonesia. Untuk itulah konstitusi menetapkan secara impratif: “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama bersama atas dasar asas kekeluargaan*”. Perkataan “perekonomian disusun” artinya perekonomian tidak dibiarkan tersusun sendiri sesuai selera dan kehendak pasar.⁷

⁶ Lestari Agusalim, Muhammad Karim dan Asef Saefuddin, *Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional*, (Jurnal: Kesejahteraan Sosial, Jurnal of Social Welfare) Vol. 1 No. 1 Januari 2014. h. 40.

⁷ Sofyan Sulaiman, *Ekonomi Indonesia*, (Jurnal: Syariah UNISI) Vol. VII, No.2, Oktober 2019. h. 3.

Konsep Ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila ini kemudian baru dikembangkan secara serius dan hangat dimulai sejak seminar nasional UGM pada tahun 1980 hingga puncaknya 1981 berkisar pada gagasan Mubyarto mengenai Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) yang bisa disebut juga sebagai lawan dari ekonomi konvensional. Definisi tentang ekonomi Pancasila banyak diperkenalkan oleh Mubyarto sejak tahun 1970-an. Mubyarto dalam artikel di surat kabar *Kompas* (12/11/2003) yang berjudul: "Menebus Dosa-dosa Ekonom Indonesia" mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai berikut:

"Ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang mengacu pada Idiologi Pancasila. Artinya mekanisme bekerjanya (sistem) ekonomi Pancasila didasarkan pada data-data riil ekonomi Indonesia dan tindakan pelaku ekonomi yang moralistik, sosio-nasionalistik, dan sosio demokratik. Ekonomi Pancasila bukanlah ekonomi ekonomi normatif (*das sollen*) tetapi ekonomi positif (*das sein*) sekaligus normatif, karena menggambarkan secara riil perilaku nyata manusia Indonesia yang merupakan *homo socius*, *homo ethicus*, sekaligus *homo economicus* dalam sistem ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan".⁸

Ekonomi Pancasila yang dipelopori oleh seorang Prof. Dr. Mubyarto merupakan ekonomi dengan konsep pasar yang mengacu pada setiap sila Pancasila. Sila *Ketuhanan yang maha Esa*, berarti ekonomi harus medasarkan diri pada moral, karena Tuhan sesungguhnya yang menjadi pemilik dan penguasa atas semua ini. Sila *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, berarti ekonomi bersifat manusiawi dan adil, mengaggap sama semua manusia, satu dengan yang lain tidak boleh ada yang mempunyai kedudukan atau hak yang lebih tinggi. Sila *Persatuan Indonesia*, berarti bentuk nasionalisme ekonomi, bahwa setiap kebijakan harus sejalan dengan nasionalisme. Sila *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat*

⁸ Hastangka, *Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto*, (Jurnal: Filsafat Vol. 22, Nomor 1, April 2012). h. 38.

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti prinsip demokrasi ekonomi, bahwa setiap orang, baik itu miskin ataupun lemah tetap harus diikutsertakan dalam tiap pembuatan kebijakan dan keputusan. Lalu sila *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* yang berarti tujuan akhirnya.

Jika kelima sila itu diperas secara analisis terdapat gagasan yang mendalam bagi perekonomian Indonesia, sila pertama dan kedua itu merupakan dasarnya, yaitu moral dan kemanusiaan, sila ketiga dan keempat menjadi caranya, berupa nasionalisme dan demokratis, dan sila kelima merupakan tujuan akhirnya yang benar-benar adil dan makmur.⁹

Dalam konsep ekonomi Pancasila Prof. Dr. Mubyarto terdapat lima ciri khas yang harus diolah, digarap, dikembangkan, ditumbuhkan, dan diperjuangkan. Kelima ciri khas tersebut diserap dari UUD 1945 dan tidak terlepas dari Pancasila itu sendiri. Pertama, Dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi merupakan soko guru perekonomian yang paling konkret sebagai manifestasi paling konkrit dari usaha bersama. Kedua, Perekonomian digerakkan atas rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Ekonomi Pancasila merespon makin parahnya degradasi moral bangsa dalam wujud semakin banyaknya perilaku ekonomi (bisnis) yang mengabaikan nilai-nilai etika, moral dan keagamaan. Ketiga, Egalitarianisme, kehendak seluruh masyarakat Indonesia ke arah keadaan pemerataan sosial dengan semangat dan spirit kekeluargaan dan solidaritas. Keempat, Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Artinya nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi Indonesia. Kelima, Terdapat ketegasan mengenai keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi,

⁹ Dumairy & Tali Nugroho, *Ekonomi Pancasila dan Warisan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h.21.

artinya ada perencanaan yang jelas antara perencanaan tingkat nasional hingga tingkat regional.¹⁰

Hal inilah yang mendasari bahwa Prof. Dr. Mubyarto menyatakan bahwa sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi atau sistem perekonomian yang berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Komunis. Ekonomi Pancasila menurutnya adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional. Kegotong-royongan nasional, bukan hanya kegotong-royongan di pedesaan, di rukun kampung, tetapi kegotong-royongan tingkat skala nasional.¹¹

Oleh karena itu, Indonesia sebenarnya mempunyai keunikan perekonomian tersendiri sesuai dengan norma, adat istiadat, nilai dan kultur budaya masyarakat Indonesia yang seharusnya berada diluar sistem ekonomi besar dunia yang berlaku dibanyak negara yakni kapitalisme dan komunisme. Sistem Ekonomi Indonesia adalah sistem yang khas dan genuine dirancang oleh para pendiri bangsa yang merupakan "jalan ketiga" (*the way third way*), dan bukan menjadi jalan tengah dari dua ideologi besar tersebut dan tidak hanya menekankan pada titik pertumbuhan tetapi lebih kepada titik pemerataan.¹²

Bangsa Indonesia yang berideologi dan berfalsafahkan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar landasan kehidupannya, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Disana disebutkan bahwa Pancasila adalah pedoman untuk meraih kebahagiaan, mencapai sejahtera dan perdamaian, serta kemerdekaan bagi

¹⁰ Lestari Agusalim dkk, *Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional*, (Jurnal of Social Welfare Vol.1 No.1 Januari 2014). h. 44-45.

¹¹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta:LP3ES, 1987) h. 32-33.

¹² Dawan Raharjo, *Menuju Sistem Ekonomi Perekonomian Indonesia*, (Jurnal: UNISA) Vol. XXXII No.72 Desember 2009. h. 115.

sebuah negara yang berdaulat. Nilai-nilai yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia termasuk nilai adat istiadat asli bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran utama beberapa agama dan berbagai suku bangsa. Dalam hal ini, dengan melihat komposisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tampaknya juga paling besar peranannya dalam mempengaruhi aturan nilainya dalam segi acuan hukum, kaidah serta pedoman masyarakat dalam bertindak akan selalu berpijak pada aturan hukum dan nilai-nilai Islam, maka secara logis dapat dilihat bahwa masyarakatpun akan melihat kebijakan-kebijakan ekonomi berdasarkan nilai-nilai yang senantiasa berkaitan dengan yang diterapkan didalam nilai-nilai Islam.¹³

Islam adalah suatu sistem kehidupan yang utuh dan terpadu (*a comprehensif way of life*), yang mana Islam telah memberikan panduan dinamis dan lugas terhadap berbagai perangkat dan petunjuk kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu ada istilah ekonomi Islam, Ekonomi Islam sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai macam permasalahan ekonomi, serta mempelajari perilaku individu, masyarakat dan negara.¹⁴

Ekonomi Islam yang mengacu pada nilai-nilai Ilahiah yang bersumber pada Al-qur'an dan Sunnah, tentu sangat jauh berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme maupun

¹³ A.Sofyan Alnashr dan Muzayyanah, *Studi Komparansi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam (Perbandingan Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan)*, (Jurnal: Islamic Riview JIE) Volume. V No. 2 Oktober 2016. h. 209.

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 4.

sistem ekonomi negara kesejahteraan (*welfare state*). Ekonomi Islam tidak hanya bercirikan ketuhanan dan moral, tetapi juga berkarakter kemanusiaan *habluminallah* dan *hablumminannas*. Hal ini disebabkan karena tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera.¹⁵ Ada nilai moral di dalamnya yaitu; Qona'ah, menghindari mubazir, tidak serakah, tidak konsumtif. Ada instrumen pemerataan; zakat, infaq, wakaf, sedekah dan juga ada peran pemerintah (*Tadakhul Dawliyyah*) di dalamnya yang menjaga *maqasid*, menjaga kemaslahatan orang banyak.

Pemerataan keadilan sosial yang merupakan tujuan dari ekonomi Pancasila, ketimpangan sosial dan kesenjangan sosial yang ingin diatasi oleh ekonomi Pancasila, demokrasi ekonomi yang bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi tanpa diskriminasi, ekonomi dengan berlandaskan moral, etika dan keagamaan yang berlandaskan kepada ketuhanan dalam menjalankan setiap aktivitas dalam ekonomi, nasionalisme ekonomi baik orang kaya, lemah maupun miskin tetap diikutsertakan dalam permusyawaratan pembuatan kebijakan dalam ekonomi Pancasila.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila pastilah bernafaskan Agama, Kemudian jika dilihat dari penduduk Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dengan acuan hukum dan kaidah serta pedoman mereka bertindak maka selalu tidak terlepas dan senantiasa berpijak atas aturan dan hukum Islam. Maka secara logis poin penting dalam ekonomi Pancasila di atas, sedikit banyaknya masyarakat akan melihat kebijakan-kebijakan dari sistem perekonomian Pancasila dalam perspektif yang berkaitan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai ekonomi Islam.

¹⁵ Muh. Ruslan Abdullah & Faisha Kamal, *Pengantar Islamic Economics*, (Makassar: LIPa, 2014), h. 11-12.

Sketsa Biografi Prof. Dr. Mubyarto

Prof. Dr. Mubyarto lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 3 September 1938. Masa kecil hingga besarnya ia mencapai sarjana dihabiskan di kota Yogyakarta. Beliau wafat di rumah sakit umum Dr. Sardjito Yogyakarta pukul hari Selasa 13:49 di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 2005 akibat serangan penyakit jantung dan paru-paru basah.

Prof Dr. Mubyarto atau biasa dipanggil kebanyakan orang dengan gelar pak Muby oleh orang tuanya diartikan sebagai “cahaya terang”. Melalui nama itu oleh orang tuanya berharap agar kelak Mubyarto bisa menjadi cahaya terang buat keluarganya. Prof. Dr. Muby merupakan Guru besar Universitas Gadjah Mada yang diakui sebagai ekonom yang menaruh perhatian kepada ekonomi pedesaan. Pak Muby seorang guru besar ekonomi Gadjah Mada itu meninggalkan satu orang istri Sri Hartati Mubyarto dan empat orang anak Andianto Hidayat, Tantiarini Hidayati, Satriyantono Hidayati, Dadit Gunarwanto Hidayat serta enam orang cucu.¹⁶

Prof. Dr. Mubyarto atau yang kerap disapa Pak Muby ini menghabiskan masa kecilnya di kota kelahirannya, Yogyakarta. Pak Muby memulai pendidikan awalnya yaitu di tingkat sekolah dasar (SD), beliau SD di Demak Ijo Jawa Tengah pada tahun 1950. Setelah beliau menamatkan sekolah dibangku SD, maka beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yakni ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri II Yogyakarta tepatnya pada tahun 1953. Dan kemudian setelah lulus di tingkat SMPN beliau melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 BOPKRI pada tahun 1956 di kota yang sama yakni Yogyakarta. Selama tiga tahun berada di jenjang pendidikan SMA kemudian beliau menamatkan pendidikan dan lanjut ke jenjang perguruan tinggi Fakultas Ekonomi UGM, Jurusan Agraria pada tahun 1959).

¹⁶ Dumairy & Tali Nugroho, *Ekonomi Pancasila dan Warisan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h.11-12

Setelah tamat sebagai seorang sarjana muda Prof. Dr. Mubyarto kemudian melanjutkan pendidikan untuk berangkat ke Amerika Serikat untuk menggali ilmu yang lebih dalam lagi beliau masuk ke Universitas Vanderbilt AS yang kemudian memperoleh gelar M.A. Pada tahun 1965 beliau kemudian masuk ke Iowa State University di Amerika Serikat dan memperoleh gelar Ph.D. Kemudian terakhir pada tahun 1979 beliau bergabung di Lembaga Penelitian Pangan Universitas Stanford, California, Amerika Serikat pada tahun 1979.¹⁷

Prof. Dr. Mubyarto menilai perekonomian Indonesia dan pembelajaran ekonomi di sekolah-sekolah dan kampus-kampus sejauh ini telah didirikan berdasar ajaran teks dari Barat yang menjadi arus utama dalam pemikiran pakar ekonomi dan teknokrat Indonesia, padahal menurut keberibadiannya ajaran Barat jelas adalah pasar persaingan sempurna yang berlaku secara global. Prof. Dr. Mubyarto menyayangkan tidak digubrisnya perbedaan sistem, nilai, dan budaya Barat, dengan sistem, nilai, dan budaya Indonesia.¹⁸

Profesi utama Prof. Dr. Mubyarto adalah seorang dosen dan guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada yang berawal dari tahun 1959 hingga tahun 2003. Salah satu jabatan penting di dalam karirnya yang ditempuh bersama UGM adalah pada saat menjabat sebagai Direktur Lembaga Penelitian Ekonomi FE UGM pada tahun 1965 hingga 1975, direktur pendidikan pascasarjana FE UGM pada tahun 1976 hingga 1979, dan terakhir beliau menjadi Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan & Kawasan (P3PK) UGM pada tahun 1983 hingga 1994). Selama dipimpin oleh pak Muby, P3PK secara intensif melakukan berbagai penelitian dibidang pedesaan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia.

¹⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mubyarto>

¹⁸ Dumairy & Tali Nugroho, *Ekonomi Pancasila dan Warisan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h.19.

Kemudian pada priode tahun 1968 hingga 1971 beliau pernah menjabat sebagai birokrat diantaranya adalah sebagai Penasihat Mentri Perdagangan, pada tahun 1987 hingga 1998 beliau menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) kemudian selanjutnya pada tahun 1993 hingga 1998 beliau juga menjabat sebagai Asisten Mentri/Kepala Bappenas. Pada tahun berikutnya yakni 1998 hingga 1999 beliau pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menko Ekuin. Sejak 2002 hingga 2005, Prof Dr. Mubyarto sebagai pendiri sekaligus menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM sampai beliau kemudian wafat tahun 2005. Pustep didirikan oleh UGM dibawah kepemimpinan Rektor Sofyan Efendi, untuk mendalami dan mengembangkan konsep Ekonomi Pancasila yang telah ramai menjadi bahan diskusi utama Indonesia sejak tahun 1980.¹⁹

Pada tahun 2002 terjadi amandemen UUD 1945 pasal 33 yang sempat ingin dihilangkan bunyi pasal “asas kekeluargaan” oleh mafia barkley Sjahrir, Sri Mulyani, Bambang Soedibyo, dan Didi J. Rachibini namun berhasil ditentang oleh Prof. Dr. Mubyarto dan dimentahkan di mahkamah konstitusi. Mereka ingin menafsirkan “dikuasi oleh negara” berarti negara mempunyai hak sebesar-besarnya untuk mengatur SDA, termasuk menyerahkannya kepada asing.²⁰

Konsep Ekonomi Pancasila Menurut Prof Dr. Mubyarto

Menurut Mubyarto ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mengandung aspek-aspek moral. Karena itu menurutnya ilmu ekonomi adalah sebagai sistem yang menggambarkan perikehidupan manusia sehari-hari, yang menyangkut usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan

¹⁹ Sri-Edi Swasono, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional*, (Jakarta: UI Press, 1987) h. 284

²⁰ Sofyan Sulaiman, *Ekonomi Indonesia*, (Jurnal: Syariah UNISI) Vol. VII, No.2, Oktober 2019. h. 13.

kebutuhan itu tidak hanya aspek material, tapi ada aspek moralnya, ada aspek sosialnya, ada aspek politisnya, ada aspek sosial budayanya dan aspek-aspek lainnya.

Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah sistem ekonomi atau sistem perekonomian tetapi berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Komunis. Oleh karena itu, ekonomi Pancasila menurutnya adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional. kegotong-royongan nasional, bukan hanya kegotong-royongan di pedesaan, di rukun kampung, tetapi kegotong-royongan tingkat nasional.²¹

Menurutnya, ekonomi Pancasila merupakan ekonomi pasar yang mengacu pada setiap sila Pancasila. Sila *ketuhanan yang maha esa*, berarti ekonomi harus medasarkan diri pada moral, karena Tuhan sesungguhnya yang menjadi pemilik dan penguasa atas semua ini. Sila *kemanusiaan yang adil dan beradab*, berarti ekonomi bersifat manusiawi dan adil, mengaggap sama semua manusia, satu dengan yang lain tidak boleh ada yang mempunyai kedudukan atau hak yang lebih tinggi. Sila *persatuan Indonesia*, berarti bentuk nasionalisme ekonomi, bahwa setiap kebijakan harus sejalan dengan nasionalisme. Sila *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*, berarti prinsip demokrasi ekonomi, bahwa setiap orang baik itu miskin ataupun lemah tetap harus diikutsertakan dalam tiap pembuatan kebijakan. Sila *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* berarti indikator tujuan akhir dari sistem ekonomi tersebut.²²

Lebih lanjut Mubyarto menerangkan bahwasanya, lima ciri khas sistem ekonomi Pancasila yaitu sebagaimana bisa diserap

²¹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta:LP3ES, 1987) h. 32-33.

²² Dumairy & Tali Nugroho, *Ekonomi Pancasila dan Warisan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h.21.

dari UUD 1945 pasal 33 yakni: *Pertama*, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi merupakan soku guru perekonomian. *Kedua*, perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting adalah moral, *Ketiga*, Kehendak bersama yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial, elititarianisme. *Keempat*, Prioritas kebijakan ekonomi ialah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti bahwa nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. *Kelima*, Adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.²³

Jadi jika kelima sila itu diperas secara analitis, maka sila pertama dan kedua menjadi dasarnya ekonomi Pancasila, yaitu moral dan kemanusiaan. Sila ketiga dan keempat itu caranya, berupa nasionalisme dan demokratis. Lalu sila kelima itu merupakan tujuannya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁴

Dari apa yang diutarakan Prof. Mubyarto tersebut jelas bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan suatu sistem atau pengelolaan ekonomi yang berpedoman pada perinsip kekeluargaan, kemanusiaan, pemerataan sosial, nasionalisme ekonomi, dan keseimbangan pusat dan daerah yang dikerjakan atau dikelola secara bersama-sama atau dengan prinsip gotong royong.²⁵

²³ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta:LP3ES, 1987), h. 40.

²⁴ Dumairy & Tali Nugroho, *Ekonomi Pancasila dan Warisan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h.21.

²⁵ Robby Alexander Sirait, *Pengelolaan Ekonomi Indonesia Masih Jauh Dari Cita-cita Ekonomi Pancasila*, (Bulletin APBN: Vol. III, Edisi 8, Mei 2018). h. 4.

Secara singkat Prof. Dr. Mubyarto menyimpulkan bahwa negara menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat melalui 4 cara, yaitu:

1. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.
3. Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.
4. Penyediaan lapangan kerja.²⁶

Dalam pasal-pasal UUD 1945 kemudian dirinci bagaimana hak-hak bangsa Indonesia, sistem ekonomi Indonesia dan pengelolaan sumber daya alam. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

PASAL	BUNYI PASAL
Pasal 27 ayat 2	Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 28 D ayat 2	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
Pasal 28 H ayat 2 dan 3	1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan 2) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Pasal 33	1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

²⁶ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila (Lintasan Pemikiran Mubyarto)*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997) h. 175.

- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- 1) Fakir miskin dan anak-anak dipelihara oleh negara
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.²⁷

Mengenai ekonomi Pancasila, Mubyarto mengemukakan lima karakter khas sebagaimana tersebut diatas harus diolah, digarap,

²⁷ Sofyan Sulaiman, *Ekonomi Indonesia*, (Jurnal: Syariah UNISI) Vol. VII, No.2, Oktober 2019. h. 4-5.

dikembangkan, ditumbuhkan dan diperjuangkan bersama-sama. Wakil presiden Republik Indonesia yang juga merupakan ekonom sahabat sekaligus rekan seperjuangan Prof. Dr. Mubyarto di PUSTEP UGM, Boediono mengunggulkan ekonomi Pancasila dalam bukunya “Ekonomi Indonesia Mau ke Kemana?” ia mengungkapkan gagasan tentang ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya peranan dominan koperasi dalam kehidupan ekonomi. Dibidang-bidang yang tidak bisa dikelola secara efisien dalam bentuk koperasi, perusahaan negara memegang peranan, dan bidang-bidang yang tidak bisa diusahakan secara efisien oleh kedua badan usaha tersebut, dalam prinsip maupun praktek, perusahaan swasta mengambil peranan. Namun, semua bentuk badan usaha dalam Ekonomi Pancasila harus didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip harmoni, dan bukannya pada asas kepentingan dan prinsip konflik kepentingan.
2. Diterapkannya rangsangan-rangsangan yang bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakkan roda perekonomian. Hal tersebut bersumber dari pandangan bahwa manusia bukan hanya *economic man*, melainkan juga *social* dan *relegius man*. Motif mengoptimalkan terpenuhinya kepentingan pribadi dan oportuniste bukan lagi motif yang kuat bagi berputarnya roda kegiatan ekonomi.
3. Adanya kecendrungan dan kehendak sosial yang kuat kearah egalitarianisme atau pemerataan sosial. Dalam hal ini cita-cita ekonomi Pancasila menunjukkan kesamaan dengan doktrin dasar hampir semua agama besar yang ada maupun dengan cita-cita yang terkandung dalam sistem ekonomi sosial sekuler.
4. Diberikannya prioritas utama pada terciptanya perekonomian nasional yang tangguh. Ekonomi Pancasila menyadari bahwa unsur nasionalisme ekonomi merupakan kenyataan hidup yang tidak bisa diingkari.

5. Pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.²⁸

Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila yang diutarakan oleh Prof. Mubyarto tersebut merupakan prinsip-prinsip yang bertolak belakang dengan penerapan sistem ekonomi pasar yang lebih individualis, *homo homini lupus*, menghilangkan batasan kedaulatan suatu negara (nasionalisme hanya sebatas kedaulatan administratif) serta efisiensi yang tidak memperdulikan aspek pemerataan.²⁹ Oleh karena itu, peran negara atau campur tangan pemerintah menjadi sangat diperlukan dalam upaya memastikan pengelolaan ekonomi nasional tetap berada pada rel cita-cita Pancasila, yakni masyarakat yang adil dan sejahtera.

Demikianlah, dalam sistem ekonomi Pancasila memiliki peranan unsur moral dan agama yang kuat apabila dihayati berkali-kali dan renungkan dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila sebagaimana tercantum dalam mukadimah UUD 1945. Maka akan dirasakan bahwa pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa asing, di samping untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupannya, adalah kemudian amat penting untuk mencapai tujuan akhirnya yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.³⁰

Di negara kita Indonesia pandangan hidup Pancasila memberi dasar kuat pada konsep ekonomi yang berdasar moral, lebih-lebih setelah runtuhnya paham komunisme tahun 1965,

²⁸ Lestari Agusalim, *Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional*, (Jurnal Of Social Welfare, Vol. 1 , No.1 2014). h. 46.

²⁹ Robby Alexander Sirait, *Pengelolaan Ekonomi Indonesia Masih Jauh Dari Cita-cita Ekonomi Pancasila*, (Bulletin APBN: Vol. III, Edisi 8, Mei 2018). h. 4.

³⁰ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta:LP3ES, 1987) h. 62.

dimana terjadi kebangkitan kembali semangat pancasila dalam P4 (pedoman, Penghayatan, Pengamalan Pancasila).³¹ Berhubungan dengan itu konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Mubyarto ini sangat berbeda dengan teori ekonomi klasik terutama sekali dalam aspek moralnya yang bersumber atas nilai agama dan adat istiadat budaya bangsa.

Dari pemaparan yang panjang diatas, maka dapat diketahui bahwa konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Mubyarto tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur keagamaan yang terkandung didalamnya, terutama dalam agama Islam. Hal ini akan dijelaskan lebih rinci pada pembahasan berikutnya mengenai Konsep Ekonomi Pancasila dan Relevansinya Terhadap Nilai-nilai Ekonomi Islam.

Pemikiran Ekonomi Pancasila Mubyarto dan Relevansinya Terhadap Nilai-nilai Ekonomi Islam

Bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai nilai dasar landasan kehidupannya, percaya bahwa moral kehidupan ekonominya berdasarkan moral Pancasila. Dalam Pancasila, manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai anggota masyarakat, antara hidup materi dan hidup rohani. Manusia Pancasila yang ber-*Ketuhanan yang maha Esa* adalah selain *homo-economicus*, juga *homo metafikus* dan *homo mysticus*. Berarti bahwa dalam ekonomi Pancasila manusia tidak dilihat dari satu segi instink ekonominya saja, tetapi sebagai manusia bulat, manusia seutuhnya. Sebagai manusia yang utuh, ia berpikir, bertingkah laku, berbuat, tidak berdasar pada rangsangan ekonomi saja, tetapi selalu memperhatikan rangsangan faktor sosial dan moral; faktor sosial dalam hubungannya dengan

³¹ Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1998) h. 88-89.

manusia lain dan masyarakat dimana ia berada, dan faktor moral dalam hubungannya sebagai titah Tuhan dengan penciptanya.³²

Di Indonesia, diakui eksistensi dan hak hidup beberapa agama dan kepercayaan sebagaimana Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Nilai-nilai yang dikembangkan berasal dari beberapa agama termasuk nilai-nilai adat asli bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa. Dalam hal ini, agama Islam dianut oleh sebagian besar mayoritas bangsa Indonesia, tampaknya juga paling amat besar peranannya dalam mempengaruhi aturan-aturan nilainya. Misalnya, pasal 33 ayat 1 UUD 1945 mengatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.³³ Ayat ini sejalan dengan kitab suci Al-Qur'an 4:1 dan 49:10

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (An-Nisa: 1)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

³² Mubyarto, *Ekonomi Pancasila (Lintasan Pemikiran Mubyarto)*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997) h. 90.

³³ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta:LP3ES, 1987) h. 37-38.

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (Al Hujarat: 10)

Jelaslah dari ayat-ayat tersebut bahwa, menurut agama Islam, suatu bangsa merupakan keluarga besar yang harus bekerjasama dalam hidup berekonomi, dan tidak dibenarkan bersaing yang dapat berakibat saling mematikan. Pandangan yang demikian berbeda dengan pandangan liberalisme yang menganggap persaingan bebas menghasilkan harmoni dan kesejahteraan masyarakat.³⁴

Pada dasarnya sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh terhadap rakyat yang kecil. Sistem ekonomi Pancasila sesungguhnya tidak menafikan adanya mekanisme pasar. Namun berbeda dengan mekanisme pasar yang dianut oleh sistem ekonomi neoliberal, sistem ekonomi Pancasila lebih mengedepankan perlindungan dan pemihakan bagi pelaku ekonomi lemah yang belum mampu bersaing secara bebas di pasar dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Menurut Prof. Dr. Mubyarto, pancasila terdiri dari etika, moral, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan/demokrasi dan keadilan sosial. Jika, sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat adalah caranya, maka sila kelima adalah tujuan dari ekonomi Pancasila.³⁵

Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan, dan kerjasama. Ini merupakan nilai-nilai tradisional yang bersumber pada budaya Indonesia. Tapi asas kekeluargaan ini, yang berdasarkan kepada

³⁴ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila (Lintasan Pemikiran Mubyarto)*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997) h. 99.

³⁵ Dumairy & Tali Nugroho, *Ekonomi Pancasila dan Warisan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h. 21.

solidaritas mekanis, telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional, dengan nilai-nilai individualisme dalam lembaga keuangan yakni koperasi dan perusahaan.³⁶

Ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan dimuka adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sementara ekonomi Pancasila bersumber dari idiologi Pancasila atau turunan UUD 1945. Perekonomian dalam Islam adalah perekonomian yang berlandaskan tauhid dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, muamalah sesama manusia dengan manusia dan alam semesta. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk *Referencce Frame Work* yang akan menjadi pedoman dalam berbisnis dan berusaha.³⁷ Jadi jelas letak nilai-nilai perbedaanya hanya mengacu pada idiologi yang dianut, meski demikian banyak pula persamaan diantara keduanya.

Keterkaitan Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*welfare state*). Berbeda dengan kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Q.s Al-Humazah:1-2.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جُمِعَ مَالًا وَعَدَدَهُ ﴿٢﴾

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.”

Ajaran Islam yang paling nyata adalah menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial, yang tercermin dalam Q.s Al-Hasyr: 7

³⁶ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila (Lintasan Pemikiran Mubyarto)*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997) h. 41.

³⁷ Ely Suryani, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Ekonomi Kontemporer*, (Jurnal: Al-Hurriyah, Vol. 12, No, 01, Januari-Juni 2011). h. 8.

م ۛ آ آفَاءَ ٱللَّهِ عَلَىٰ رَسُوْلِهِۦ ۚ مِّنْ أَهْلِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلْقَلِيَّةِ وَلِلرَّسُوْلِ
 وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِيْنَ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيْلِ كَىٰ لَا يَكُوْنَ
 دُوْلَةً بَيْنَ ٱلْأَعْيْنَآءِ مِّنْكُمْ وَمَا ءَاتَكُمُ ٱلرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا
 نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوْا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيْدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧٠﴾

“Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Disandingkan dengan sosialisme, Islam berbeda dalam hal kekuasaan negara, yang dalam sosialisme maupun komunisme sangat dominan dan kuat menentukan aturan main. Sedangkan dalam Islam kebebasan individu dinilai tinggi, dan jelas ini bertentangan dengan ajaran sosialisme.

Kemudian ajaran ekonomi kesejahteraan (*welfare state*) yang berada ditengah-tengah antara kapitalisme dan sosialisme memang lebih dekat ke ajaran Islam. Bedanya hanyalah bahwa dalam Islam etika benar-benar dijadikan pedoman perilaku ekonomi sedangkan dalam *welfare state* tidak demikian, karena etika *welfare state* adalah sekuler yang tidak mengarahkan pada integrasi vertikal antara aspirasi material dan spiritual.³⁸ Singkatnya moralitas teori ekonomi Smith adalah kebebasan (liberalisme) dan moralitas ekonomi Marx adalah diktator mayoritas (kaum proletar), maka moralitas ekonomi Pancasila

³⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 12.

mencakup ajaran-ajaran Katuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.³⁹

Untuk melihat titik temu dari ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam maka perlu kiranya mlihat tujuan dari masing-masing kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral Islam (Q.s Al-Baqarah: 2 dan 168, Q.s Al-Ma'idah: 87-88, Q.s Al-Jumu'ah: 10).
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan, dan persaudaraan yang universal (Q.s Al-Hujarat: 13, Q.s Al-Mai'dah: 8, Q.s Al-Syu'ara: 183).
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (Q.s Al-An'am: 165, Q.s Al-Nahl: 71, Q.s Al-Zuhkruf: 32).
4. Meciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (Q.s Ar-Ra'd: 36, Q.s Luqman: 22)⁴⁰

Sementara itu, tujuan ekonomi Pancasila dapat dirumuskan menjadi empat tujuan pokok:

1. Mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial yaitu tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
2. Semangat nasionalisme ekonomi, dimana dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri.
3. Demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan, koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku perorangan dan masyarakat.
4. Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan

³⁹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila (Lintasan Pemikiran Mubyarto)*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), h. 91.

⁴⁰ Abdul Ghafur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 24.

otonomi yang luas, bebas dan bertanggung jawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴¹

Pemerataan keadilan sosial yang menjadi tujuan dari ekonomi Pancasila jelas sesuai dan telah ter-cover dalam tujuan ekonomi Islam. Ketiimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang ingin diatasi oleh ekonomi Pancasila memang menjadi titik perhatian juga dari ekonomi Islam. Demokrasi ekonomi yang ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi tanpa diskriminasi dikembangkan pula dalam ekonomi Islam. Bahkan Islam pun mengatur campur tangan pemerintah dalam sektor yang menyangkut hidup orang banyak dengan membolehkan pemerintah memegang monopoli pada sektor tertentu. Hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat terhadap *public good* dapat terjamin, seperti: air, energi, listrik, barang tambang, dan hutan. Keseimbangan yang harmonis dan adil serta otonomi ekonomi yang bertanggungjawab juga menjadi perhatian dalam Islam yang diakui dalam kebebasan individu yang bertanggungjawab dalam konteks kesejahteraan sosial bersama.⁴²

Pada dasarnya sebagaimana telah panjang lebar diuraikan diatas, ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam terdapat banyak kesamaan antara keduanya, dan hanya terdapat beberapa perbedaan anantara keduanya, diantaranya yaitu:

1. Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam mengutamakan prinsip persaudaraan, yakni menganggap bahwa setiap pelaku ekonomi merupakan saudara dan tidak membernarkan persaingan yang mengakibatkan ketidaksejahteraan masyarakatnya. Sebagaimana Al-Qur'an surat An-Nahl: 90.

⁴¹ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan*, dalam Jurnal Ekonomi Rakyat, Vol. 3 No, 6 Tahun 2004. h. 32.

⁴² Sofyan Rizal, *Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan*, (Jurnal" Al-Iqtishad, Vol. 3 No, 1 Januari 2011, h. 12.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

2. Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang prinsip dasarnya sama-sama terletak pada moral agama yakni harus percaya pada Tuhan dan tidak merugikan sesama makhluk lain. Sebagaimana Al-Qur'an An-Naml: 5.

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ﴾

“Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk (di dunia) dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.”

3. Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi campuran, artinya kedua sistem tersebut mengadaptasi hal-hal positif dan membuang hal-hal negatif dari kedua kutub sistem ekonomi yang telah ada sebelumnya yakni sosialis dan kapitalis.
4. Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam mengakui adanya mekanisme pasar dan mengakui adanya turut serta campur tangan pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan hajat kehidupan orang banyak.
5. Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam memiliki satu prinsip yakni keadilan masyarakat atau umatnya.

Letak perbedaan diantara keduanya, ekonomi Pancasila mengacu pada amanah Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar idiologi hukumnya, sedangkan ekonomi Islam

sumber hukumnya dan aturan mainnya diatur oleh Al-Qur'an, Hadis atau Sunnah, Ijma', Qiyas, Ijtihad, Istislah, Istishab, dan Istishan. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani dan Insani*. Disebut ekonomi *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiah, dikatakan ekonomi *Insani* karena sistem ini dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kemakmuran manusia.⁴³ Sedangkan ekonomi Pancasila sistem yang memiliki sifat dasar berkeadilan sosial dan mampu mewujudkan pasar yang tepat bagi masyarakat.

Di Indonesia, walaupun Islam merupakan penduduk dengan agama mayoritas, sistem ekonomi Islam cukup sulit diterapkan secara keseluruhan dari pusat hingga daerah, tetapi sistem ekonomi Pancasila dengan kompleks mencakup semua suku, agama, budaya, adat istiadat yang merupakan buah pemikiran para tokoh bangsa kiranya dapat lebih leluasa untuk dikembangkan. Merujuk pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi Pancasila menekankan pada moral spiritual yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya dalam sistem ekonomi Islam.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan secara khusus oleh Prof. Dr. Mubyarto maupun ekonomi Pancasila yang telah dikembangkan oleh pemikir lain⁴⁴, ini sejalan dengan konsep ekonomi dalam Islam. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa banyak persamaan tujuan, prinsip, karakteristik, ciri-ciri, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang menjunjung tinggi mewujudkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, pemerataan, yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis.

⁴³ Veitzhal Rivai, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 94.

⁴⁴ Muhammad Hatta, Emil Salim, Sri Edi Swasono, Gunawan Sumodiningrat, Rakmono Markam, Boediono, Dawan Raharjo, Mr. Wilopo, rekan-rekan di pusat studi ekonomi Pancasila-UGM Yogyakarta, dst.

Adapun alasan penyusun mengatakan bahwa konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Mubyarto ini sejalan dengan konsep ekonomi dalam sistem Islam adalah karena di dalam buku primer yang diteliti dan dikaji penyusun secara mendalam, menyebutkan bahwa tujuan dari ekonomi Pancasila itu sama dengan tujuan ekonomi yang diperintahkan oleh Islam. Lebih lanjut, program-program ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Mubyarto seperti ekonomi kerakyatan, koperasi, ekonomi pedesaan, dan pinjaman dana bergilir juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan.

Kesimpulan

Konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang ekonomi Pancasila; Sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan dan berasaskan nilai-nilai kekeluargaan, gotong-royong yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana yang tertuang pada butir-butir sila yang terdapat dalam Pancasila yang merupakan tujuan akhir dari ekonomi Pancasila itu sendiri.

Ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Mubyarto; Sejalan dengan konsep ekonomi dalam Islam. Hal ini ditandai dengan adanya kesamaan nilai, tujuan, prinsip dan karakteristik yakni sama-sama ingin mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan.

Dengan itu maka ekonomi Pancasila dan relevansinya terhadap nilai-nilai ekonomi Islam tidak ada perbedaan secara mendasar. Apa yang tertuang dalam sistem, prinsip, dan karakteristik ekonomi Pancasila tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Artinya dalam hal ini terdapat keterkaitan dan

kesinambungan antara keduanya. Letak perbedaan diantara keduanya hanya terdapat pada dasar idiologi hukumnya.

| DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh Ruslan & Kamal Faisha. 2014. *Pengantar Islamic Economics*, Makassar: LIPa, 2014
- Amar, Faozan. 2016. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar Pengenalan*, Jakarta: UHAMKA Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dumairy & Nugroho Tarli. 2014. *Ekonomi Pancasila dan Warisan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Danupranata, Gita. 2005. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chaudhary, Muhammad Syarif. 2014. *Muhammad Syarif, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana
- Ghofur, Abdul. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Publisher.
- Harahap, Syahrin. 2006. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqomah Mulya Press.
- K. Suhrawadi, Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Madjid. Abdul dan Swasono, Sri-Edi. 1998. *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Jakarta: UI Press.
- Miswari. 2018. *Filsafat Ekonomi Islam*, Sulawesi: Unimal Press.
- Muhandis Natadiwiry. Muhandis. 2007. *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Granada Press, 2007.
- Mujahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mubyarto dkk. 2014. *Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara dan AIFIS.
- Mubyarto.1987. *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta LP3ES
- Mustafa Edwin Nasution, Mustafa Ediwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Rivai, Veitzhal. 2009. *Islamic Economic*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sholeh, Arif. 2011. *Konsep Pembangunan Ekonomi: Studi Komparatif terhadap pemikiran Mubyarto dan Umar Chapra*. Skripsi: UIN Syrif Hidayatullah.
- Solahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat. Gunawan. 1999. *Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif*, Jakarta: IMPAC WAHANA CIPTA.
- Sudarsono. Hari, 2004. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.

- Swasono, Sri-Edi. 1987. *Membangun Sistem Ekonomi Nasional*, Jakarta: UI Press.
- Swasono, Sri-Edi. 2010. *Ekpose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Yogyakarta: PUSTEP-UGM.
- Team Pembinaan Penatar, 1981. *Bahan Penataran; Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Garis-garis besar haluan negara*, Jakarta
- Agusalim, Lestari dkk. 2014. *Rekontruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional*, Jurnal: Kesejahteraan Sosial, Jurnal of Social Welfare Vol. 1 No. 1.
- Akbar Ali, Muhammad dan Ghufron, Moh. Idil. 2019. *Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No.1.
- Alnashr A. Sofyan dan Muzayyanah. 2016. *Studi Komparansi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam (Perbandingan Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan)*, Jurnal: Islamic Riview JIE Volume. V No. 2.
- Amiral. 2017, *Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*, Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol. 5, No. 02
- Bawazier, Fuad. 2017. *Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol III, No.02
- Firmansyah, Ilham. 2014. *Konsep Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Sri-Edi Swasono)*, Jurnal Vol. 6.
- Hastangka, *Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto*, Jurnal Filsafat Vol. 22, Nomor 1, April 2012.

- Hermawan, Hendri Nugraha Adi. 2013. *Norma dan Nilai Dalam Ekonomi Islam, Jurnal: Media Ekonomi & Teknologi Informasi* Vol, 21 No. 1
- Lindayani, Wiwin. 2007. *Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila (Studi Perbandingan Pandangan M. Umur Chapra dan Mubyarto)* Tesis: UIN Yogyakarta
- Mubyarto. 2004. *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi atau Revolusi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 19 No.1.
- Mubyarto. 2004. *Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan*, dalam Jurnal Ekonomi Rakyat, Vol. 3 No, 6
- Dawan. Raharzan. 2009. *Menuju Sitem Ekonomi Perekonomian Indonesia*, Jurnal: UNISA, Vol. XXXII No.72.
- Rizal, Sofyan. 2011. *Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan*, (Jurnal: Al-iqtishad: Vol.III, No. 1, Januari).
- Sirait, Robby Alexander, 2018. *Pengelolaan Ekonomi Indonesia Masih Jauh Dari Cita-cita Ekonomi Pancasila*, (Bulletin APBN: Vol. III, Edisi 8)
- Sulaiman, Sofyan. 2019. *Ekonomi Indonesia*, (Jurnal: Syariah UNISI) Vol. VII, No.2, Oktober.
- Suryani, Ely. 2011. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Ekonomi Kontemporer*, (Jurnal: Al-Hurriyah, Vol. 12, No, 01)